



Komunikasi Politik dalam Lintasan Sejarah Politik Islam

Kartini^{1*}, Anang Anas Azhar², Hasyim Syah³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: kartinisikumbang86@gmail.com¹, ananganas@uinsu.ac.id², hasyimsyah@uinsu.ac.id³

Korespondensi penulis: kartinisikumbang86@gmail.com*

Abstract. *This study discusses political communication as an important element in the political system, covering basic concepts, definitions from various perspectives, objectives, and its historical development. Political communication is understood as the process of conveying messages related to power, policy, and distribution of resources in society, which occurs between political actors, institutions, and the public. In addition to reviewing modern concepts, this study also traces the traces of political communication in Islamic history, especially during the time of the Prophet Muhammad SAW. This study shows that the Prophet Muhammad SAW applied the principles of political communication effectively in building a Muslim community, spreading Islamic teachings, managing conflicts, and establishing a state in Medina. Political communication in this context plays an important role in shaping public opinion, strengthening political participation, and delivering strategic information. These findings confirm that political communication has strong historical roots and high relevance in understanding political dynamics, both in classical and contemporary contexts.*

Keywords: *History of Islamic Politics, Political Communication, Prophet Muhammad SAW*

Abstrak. Penelitian ini membahas komunikasi politik sebagai elemen penting dalam sistem politik, mencakup konsep dasar, definisi dari berbagai perspektif, tujuan, serta perkembangan historisnya. Komunikasi politik dipahami sebagai proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat, yang terjadi di antara pelaku politik, lembaga, serta publik. Selain mengulas konsep modern, penelitian ini juga menelusuri jejak komunikasi politik dalam sejarah Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Studi ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip-prinsip komunikasi politik secara efektif dalam membangun komunitas Muslim, menyebarkan ajaran Islam, mengelola konflik, serta mendirikan negara di Madinah. Komunikasi politik dalam konteks ini berperan penting dalam pembentukan opini publik, penguatan partisipasi politik, dan penyampaian informasi yang strategis. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi politik memiliki akar sejarah yang kuat dan relevansi yang tinggi dalam memahami dinamika politik, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer.

Kata Kunci: Sejarah Politik Islam, Komunikasi Politik, Nabi Muhammad SAW

1. PENDAHULUAN

Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan komuniksai ini dapat mengikat semua warganya dengan sangsi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Rush dan Althoff (1997) mendefebisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian system politik ke bagian lainnya, dan diantara system social dengan system politik (Ahmad, S.Akbar, 2017 : 201).

Gabrel Almon berpendapat bahwa komunikasi polik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan , agregasi kepentingan, membuat peraturan , aplikasi peraturan

dan adjudikasi peraturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi system politik.

Meriam Budiardjo (1982) memahami komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu meyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk di perjuangkannya menjadi kebijakan politik. Sedangkan menurut Maswadi Rauf, mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikasi dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik. Komunikasi politik di bagi dalam dua dimensi yaitu kegiatan politik, penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-politik kepada pihak lain. Kedua, kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam system politik.

Menurut Susanto, komunikasi politik adalah komunikasi politik yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang di bahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengingatkan semua warganya melalui sanksi yang di tentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Nimmo berpandangan bahwa komunikasi politik menggunakan politik hanya untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif, yang pengatur perbuatan-perbuatan mereka dalam konflik sosial.

Menurut McQuail dalam Swanson 1990 komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisipliner yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda dan konsep dalam membangun jati dirinya. Karena itulah komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang dikalaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik. dan sering di kaitkan dengan komunikasi kampanye pemilu (*elections campaign*), karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye (Arskal Salim and Azyumardi Azra, 2013 : 25).

Menurut Luciana Pye, antara komunikasi dan politik atau pemerintahan memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan (*domain*) politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Glanor misalnya mengatakan bahwa tanpa komunikasi tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik. Dalam pandangan Pye, bahwa tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (*enlarging*) dan melipatgandakan (*magnifying*) dan pilihan-pilihan individual, maka tidak akan ada namanya politik

Komunikasi politik sebagai salah bidang kajian komunikasi, selalu menjadi fenomena yang senantiasa aktual untuk didiskusikan, terlebih di tahun politik seperti sekarang ini. Dewasa ini, politik menjadi hal yang ramai dibicarakan, bahkan tidak hanya oleh para politisi, akademisi maupun pengamat saja tetapi kini telah merambah masyarakat umum yang awam politik. Keberadaan komunikasi politik sudah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi. Tetapi sebagai telaah ilmu, perkembangannya sebagai subdisiplin ilmu yang berakar dalam revolusi ilmu sosial sejak tujuh puluh tahun yang lalu. Alwi Dahlan mengutarakan bahwa komunikasi politik mulai berkembang dalam bentuk awal dalam kandungan ilmu politik sesudah perang Dunia I, meskipun belum memakai penamaan tersebut. Hal itu terlihat dari studi mengenai pendapat umum, propaganda, dan perang urat saraf, serta berkembangnya teori media kritis sebagai bagian dari ilmu politik (Ahmad Sempurna, 2023 : 1).

Dewasa ini komunikasi diakui sebagai instrument yang sangat penting bagi semua pihak di hampir segala sektor kehidupan dan bidang kegiatan, terlebih lagi di bidang politik. Orang makin percaya bahwa dalam era reformasi ini, *information is power* di bidang mana pun; baik power dalam arti kata politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, militer, dan sebagainya. Power melalui komunikasi politik dapat di peroleh dan di kembangkan dengan berbagai cara, antara lain: Pengumpulan informasi yang bernilai tinggi; menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh memperoleh informasi dalam kelengkapan atau bobot yang bagaimana; menguasai akses sarana memperoleh informasi; menentukan penilaian atas informasi (mana yang berharga dan mana yang tidak berharga dan bagaimana cara menilainya); penguasaan atas “kebenaran” informasi, dan termasuk pula penguasaan untuk memanipulasi atau mengubah informasi (Coulson, Noel, 2007 : 90).

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama kali memperkenalkan kata politik adalah Aristoteles (384-322 S.M) seorang filsuf Yunani Kuno. Ia mengemukakan, bahwa “manusia asalah merupakan binatang politik, atau *political animal*. Berangkat dari asumsi tersebut, ia mengawali penjelasannya; bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecenderungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain. (Maksudi, 2012 :9)

Ketika seseorang mencoba untuk berusaha meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia, dan ketika mereka berupaya untuk memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka melihat dirinya sibuk dengan kegiatan (aktivitas) politik. Atas dasar itulah Aristoteles berkesimpulan, bahwa satu-satunya cara untuk

mamaksimalkan kemampuan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan, suatu kerangka yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan untuk membentuj tujuan kolektif (negara) (Dewan Redaksi, 2000 : 28).

Oleh karenanya, manusia atau seorang individu akan hidup sempurna hanya dapat dicapai dalam suatu wilayah negara, atau dalam suatu organisasi politik apa yang kala itu disebut Aristoteles dengan “*polis*” yaitu dari kata “*poliataita*”; polis berarti “kesatuan masyarakat yang diberi wewenang untuk mengurus kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara)” dan taia berarti “urusan”. Jadi, polis adalah suatu organisasi kekuasaan yang diberi wewenang untuk mengurus kesatuan masyarakat dengan menciptakan tata tertib dalam kehidupan bersama di dalam wilayah negara. Karena luas wilayah negara ini pada umumnya sangat kecil dan hanya meliputi daerah seluas suatu kota atau desa saja, maka dalam kepustakaan ilmu politik sebutan “polis” lazim diterjemahkan dengan istilah “*city state*” dalam bahasa Inggris atau negara kota (Enginer, 2009, 20)

Dari kata polis tersebut dapat diketahui, bahwa “politik” merupakan istilah (terminologis) yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Jadi, di dalam konsep ini terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sasaran pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.

Polis ini mempunyai tujuan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi warga negaranya. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan dan perencanaan untuk melakukan kegiatan polis tersebut, yakni melalui usaha-usaha yang dilakukannya dengan menggunakan suatu alat kekuasaan disuatu wilayah negara, atau disebut aktivitas politik. Maka usaha mencapai kesejahteraan lahir batin bagi umat manusia itu memerlukan semakin banyak aktivitas politik. (Hassan, Ibrahim Hasan, 2004)

Demikian pula, suatu masalah sosial akan berubah menjadi masalah politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkan, atau berkewajiban melibatkan diri untuk memecahkannya. Maka usaha untuk melibatkan pemerintah guna memecahkan satu persoalan sosial, disebut sebagai aktivitas politik; juga usaha untuk menggagalkan usaha pemerintah ikut campur dalam memecahkan satu masalah sosial, disebut sebagai aktivitas politik. Sedangkan dalam buku komunikasi politik karya Roni Tabroni menyatakan bahwa obrolan bersama para penjual makanan ringan di pinggir jalan, mereka seringkali mengeluhkan naiknya harga barang

kebutuhan pokok yang terus melonjak. Mengapa harga BBM terus naik tanpa pernah turun. Tidak sedikit pula masyarakat yang mengeluh dengan berbagai fasilitas publik yang amburadul, padahal pajak selalu dibayar tetap waktu-karena jika telat pasti ada denda.

Keluhan dan pertanyaan publik terhadap berbagai fenomena kehidupan keseharian memang sulit ditarik kesimpulan siapa yang paling bersalah. Namun, yang mereka ketahui adalah mengapa setiap lima tahun sekali mereka harus memilih presiden dan wakilnya, anggota legislatif, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota/bupati dan wakil bupati, sementara keadaan semakin memburuk. Atas dasar itu, para pakar politik memandang bahwa pada dasarnya aktivitas politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari berbagai bentuk aktivitas manusia. Baik secara langsung maupun tidak, manusia akan selalu bersinggungan dengan aktivitas politik. Ketika iklim demokrasi di Indonesia terbuka lebar, aktivitas politik meningkat sebagai salah satu imbas dari produk politik yang mengharuskan adanya pemilihan secara langsung dalam setiap jenjangnya -mulai dari pileg, pilpres, pilgub dan pilwalkot/pilkada. Dalam konteks inilah bagaimana kemudian aktivitas politik dikomunikasikan secara terbuka plus menjadi sebuah tantangan dalam proses pengemasannya. Di sinilah makna komunikasi politik menjadi sangat penting dalam melakukan aktivitas kampanye politik. Sebuah kepentingan-politif tidak mungkin bisa tercapai tanpa disertai dengan aktivitas komunikasi politik yang baik. Hanya saja, sejauh mana aktivitas komunikasi politik ini dilakukan, semuanya sangat bergantung pada kecerdasan komunikator politik atau politikus yang memiliki kepentingan politik dalam menyusun pesan-pesan politik kemudian menyampaikannya kepada publik (Philip K, 2005 : 34).

Politik juga merupakan sebuah proses interaksi yang di dalamnya terdapat sebuah kepentingan yang sedang diperjuangkan. Karenanya, Dan Nimmo menyebutkan politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Di dalamnya, politik selalu diwarnai dengan nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan dan pemegang kekuasaan, pengaruh, tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Dari semua pandangan yang beragam tersebut, ada persesuaian umum bahwa politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah sebuah kegiatan. Karenanya, politik terjadi dalam setiap setting politik yang ditandai dengan perselisihan, apakah setting itu besar seperti negara, kecil seperti perkumpulan orang-orang tertentu atau bahkan hanya dua orang. Seperti juga komunikasi, politik merupakan proses dan melibatkan pembicaraan. Bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan saja, melainkan pembicaraan dalam arti yang lebih luas, yang berarti segala cara orang bertukar simbol - baik itu kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian.

Komunikasi politik sejatinya adalah studi-studi mengenai segala macam hal dan proses politik yang memungkinkan terjadinya komunikasi, dan pada saat bersamaan, studi mengenai komunikasi itu sendiri dengan melakukan analisis terhadap segala macam proses pengolahan, penyampaian dan penerimaan informasi berikut hal-hal lainnya sebagai dampak yang mempengaruhi sikap, opini, keyakinan, sistem nilai dan perilaku individu terhadap hal-hal politik ataupun proses-proses politik, baik melalui media ataupun tanpa melalui media.

Secara sederhana, komunikasi politik hanya merupakan gabungan dari dua kata, komunikasi dan politik. Jika sudah digabungkan (komunikasi politik), memiliki makna yang lebih luas dan tidak sederhana. Secara interaksional, komunikasi politik memang berada pada domain komunikasi. Namun, pada saat yang sama, komunikasi politik telah menjembatani dua disiplin ilmu dalam ilmu sosial, yaitu disiplin ilmu komunikasi dan ilmu politik. Setiap sistem politik, sosialisasi dan perekrutan politik, kelompok-kelompok kepentingan, penguasa, peraturan, dan sebagainya dianggap bermuatan komunikasi. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai penyampaian sebuah pesan dari seseorang kepada orang lain atau publik. Menurut Dan Nimmo, (dalam Tabroni, 2012: 14) komunikasi juga dapat dipahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk dengan simbol, slogan atau tema pokok.

Dalam berkomunikasi politik tentu tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berinteraksi secara sosial, interaksi merupakan kebutuhan dasar manusia. Teralienasinya seorang individu dari sebuah komunitas sosial memungkinkan hidupnya tidak seperti manusia, tetapi seperti lingkungan yang ia tinggali (selain manusia). Dalam konteks interaksi ini, bagaimana kehidupan antar manusia dapat saling memahami. Penyampaian simbol-simbol yang dilakukan satu orang kepada orang lain memungkinkan mereka akan saling membaca simbol kemudian mempersepsi pesan sehingga dapat merespon atau memberikan feedback. Dari sinilah kemudian proses interaksi dapat berjalan dengan baik.

Ketika dunia politik membutuhkan sebanyak-banyaknya dukungan untuk menyukseskan partai atau kandidat, kunci utama dalam proses tersebut adalah sejauh mana interaksi itu dilakukan. Interaksi ini yang kemudian akan membangun komitmen antara kandidat dengan calon pemilih. Proses komunikasi ini dibangun melalui sebuah aktivitas komunikasi kedua belah pihak. Oleh karena itu, komunikasi diposisikan sebagai sebuah aktivitas yang inheren dalam sebuah proses interaksi. Sebab komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Paus tidaknya sebuah interaksi sehingga terbangunnya kepercayaan, sangat ditentukan oleh proses komunikasi yang dibangun (Lapidus, 2001 : 34)

Para ahli komunikasi mendefinisikan proses komunikasi sebagai “knowing what he want to communicate and knowing how he should deliver his message to give it deepest penetration possible into the mind of his audience.” Selain itu, para ilmuwan komunikasi pun membagi teori komunikasi dalam beberapa konsep sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh para sarjana pada dasarnya membahas masalah “kekuasaan” yang berada pada suprastruktur politik dan “kebebasan” yaitu yang berada pada infrastruktur politik. Dalam hubungan ini Sean Mac Bridge (dalam, Sumarno, 1989 :13) mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul “Many Voice One World” mengungkapkan :

“Two distinct, though related, question, demand consideration. How much, and in what ways, does politics influenc ecommunication? And then how much, and in that ways, can communication influence politics? The crucial relationships are those between communication and power, and between communication and freedom. Various conception of what these relationships should be are up held in different parts of the world, responding to various traditions, resources, social systems and development needs.”

Ungkapan Mac Bridge memberikan suatu perspektif tentang hubungan secara timbal balik yang saling mempengaruhi antara komunikasi dan politik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka atau kajian literatur untuk menganalisis dinamika komunikasi politik dalam sejarah politik Islam, dengan fokus utama pada periode Nabi Muhammad SAW. Metode ini dipilih untuk memungkinkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis yang komprehensif terhadap pengetahuan yang ada dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Proses pengumpulan data melibatkan identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber kredibel seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen sejarah yang membahas komunikasi politik, sejarah politik Islam, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten terhadap sumber-sumber yang terpilih, dengan penekanan pada identifikasi dan kajian praktik-praktik komunikasi politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Melalui sintesis dan interpretasi temuan-temuan dari berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang terstruktur dan mendalam tentang peran komunikasi politik dalam sejarah politik Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Historitas dan Tujuan Komunikasi Politik

Awal studi komunikasi politik terjadi pada tahun 1922. Ada tiga fase studi komunikasi politik, yaitu *post facto experimental* yang mengkaji efek televisi dalam pemilu presiden, *field experiment*; mengevaluasi keefektifan teknik-teknik propaganda, serta analisis isi; mengkaji bahasa politik. Almond berpandangan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, tetapi terjadi pada saat enam fungsi lainnya dijalankan, yaitu sosialisasi, rekrutmen, artikulasi, agregasi, pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan penghakiman aturan (Nur., 2021 : 45).

Ardial, memandang bahwa tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator. Sesuai dengan tujuan komunikasi, tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekadar menyampaikan informasi politik, membentuk citra politik, membentuk opini publik, dan bisa juga menghendak pendapat atau tuduhan lawan politik. Lebih jauh dari itu, komunikasi politik juga bertujuan menarik simpati publik untuk meningkatkan partisipasi politik sesuai dengan kepentingannya.

1. Citra

Citra politik bisa dipahami sebagai gambaran seseorang yang terkait dengan politik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik dan konsensus). Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terwujud sebagai konsekuensi dari kognisi komunikasi politik. Robert, dalam tudial (Anang : 2021 :27) menyatakan bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung memengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan dan citra itulah yang memengaruhi pendapat atau perilaku khalayak. Citra politik tersusun melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.

2. Opini Publik

Komunikasi politik sangat terkait erat dengan opini publik. Hal ini dianggap sebagai konsekuensi sebuah proses pencitraan yang dilakukan terlebih dalam konteks di mana pencitraan itu menggunakan media massa sebagai salah satu instrumen pendukungnya. Opini publik akan terbentuk ketika komunikator politik menyampaikan gagasan atau pesannya

kepada publik wacana yang dibangun sedikit banyak akan menjadi bagian dari perbincangan publik sehingga terbentuk opini publik yang sangat beragam.

3. Partisipasi Politik

Dalam sistem demokrasi, partisipasi merupakan aspek yang sangat vital. Masyarakat atau publik adalah pemberi saham terhadap republik ini. Publiklah yang akan menentukan nasib bangsa, termasuk nasib dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap pejabat atau wakil rakyat seringkali menyebut rakyat atau mengklaim rakyat ketika berbicara atau membuat kebijakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Komunikasi politik, sosialisasi politik, citra politik dan pendapat umum, pada akhirnya menuju ke sasaran dan tujuan, yaitu terciptanya partisipasi politik dan kemenangan para politikus dan partai politiknya dalam pemilihan umum. Keikutsertaan khalayak atau rakyat dalam memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan konsekuensi atau efek komunikasi yang sangat penting. Pemilihan umum hanya lah salah satu bentuk partisipasi politik dari rakyat (Saifuddin, 2022 : 78).

Lintasan Sejarah Politik Islam

1. Sejarah Politik di Masa Nabi Muhammad

Sebelum Nabi Muhammad mulai menyampaikan wahyu di Mekah, orang-orang Arab dalam keadaan perpecahan kronis. Setiap suku yang banyak jumlahnya di Jazirah Arab memiliki hukum sendiri dan selalu berperang dengan kelompok suku lainnya. Hampir tidak mungkin bagi bangsa Arab untuk bersatu dan itu berarti mereka tidak dapat membangun peradaban dan pemerintahan yang memungkinkan mereka mendapat tempat di dunia. Hijaz seperti dikutuk sebagai tempat barbarisme yang biadab dan jauh dari peradaban.

Setelah ajaran Islam datang semuanya berubah dan bangsa Arab saat itu menjadi pusat peradaban dunia. Hijaz merupakan tempat diutusnya Nabi Muhammad, yang membentang di antara dataran tinggi Nejed dan daerah pantai Tihamah, serta mempunyai tiga kota utama, yaitu Mekah, Yatsrib (kemudian berubah nama menjadi Madinah), dan Thaif. Bangsa Arab yang menjadi penduduk terbesar di Hijaz terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Arab Baduwi (komunitas Arab yang bertempat tinggal di gurun-gurun dan hidup nomaden) dan Arab Hadlari (komunitas Arab yang bermukim di kota). Kedua kelompok ini terdiri dari berbagai kabilah dan suku, sehingga sering terjadi konflik antara suku (Badri, 2021 : 29).

Konflik antar suku terjadi karena pola struktur masyarakat Arab berdasarkan organisasi klan yang seluruh anggota keluarga di dalam suku tersebut diikat oleh pertalian darah. Pertalian darah ini menimbulkan rasa solidaritas yang kuat di antara anggota suku yang melahirkan sikap loyalitas penuh terhadap kesatuan suku. Sikap ini menimbulkan solidaritas kelompok yang dalam istilah Arab disebut 'ashabiyah. Menurut Ibn Khaldun, 'ashabiyah di kalangan bangsa Arab justru mengandung konotasi positif, karena menimbulkan rasa persatuan, kerja sama, dan tolong-menolong yang sangat kuat dalam suatu kelompok sehingga setiap anggota dalam kelompok tersebut bersedia mengorbankan jiwa raganya demi kepentingan kelompok dan seluruh anggotanya. Karena itu, dalam mendirikan sebuah negara peranan, 'ashabiyah sangat menentukan.

Di antara beberapa suku Arab yang paling menonjol dan menguasai wilayah Arab adalah suku Quraisy. Kata Quraisy sendiri artinya adalah keterhimpunan, kekuatan, dan kesucian dari hal-hal buruk. Kata Quraisy pada mulanya adalah gelar dari an-Nadhr bin Kinanah yang merupakan kakek Nabi yang ketiga belas. Nabi Muhammad adalah Ibnu (putra) Abdullah, Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hasyim, Ibnu 'Abdi Manaf, Ibnu Qushayy, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ayy, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihri, Ibnu Malik, Ibnu an-Nadhr, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudhar, Ibnu Nazar, Ibnu Ma'ad, dan Ibnu Adnan. Inilah nasab Rasulullah yang disepakati, selebihnya masih diperselisihkan. Telah disepakati di kalangan ahli nasab dan silsilah bahwa Adnan adalah putra Nabi Isma'il a.s. bin Nabi Ibrahim a.s

Rasulullah lahir, tumbuh, dan menyebarkan ajaran Islam di tengah badai perpecahan internal suku Quraisy yang sudah akut. Masyarakat Arab saat itu, meskipun menjunjung tinggi nilai kepahlawanan, namun prestise seseorang lebih ditentukan unsur kapital, akses sosial, dan banyaknya pengikut. Beliau hadir di tengah masyarakat yang sangat materialistik yang bertumpu di atas pilar kapitalisme, ditambah lagi dengan sifat badui yang sulit diatur, dengan landasan moral paganisme yang sudah berurat berakar (Ridwan, 2017 : 111).

Menghadapi realitas masyarakat seperti itu tidak membuat rasul patah semangat. Bahkan ketika orang Quraisy meminta kepada beliau untuk menghentikan dakwah dengan kompensasi harta dan jabatan, beliau tetap teguh dalam menyebarkan ajaran Islam. Dakwah Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam pada awalnya dilaksanakan di Mekah, kemudian dilanjutkan di Yatsrib (Madinah). Menurut Haikal, pada periode Mekah umat Islam belum memulai kehidupan bernegara dan Nabi sendiri ketika itu tidak bermaksud mendirikan suatu Negara. Misi Nabi selama di Mekah terfokus pada tiga hal utama sebagai berikut. Pertama, mengajak manusia agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah

swt., percaya kepada malaikat, rasul, hari kemudian, dan hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman. Kedua, mengajarkan kepada manusia nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi agar mereka tidak tertipu oleh godaan hidup duniawi yang menyilaukan. Ketiga, mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah swt (Husen : 189).

Dalam konteks berdirinya negara Islam, periode dakwah di Mekah merupakan tahap pembentukan fondasi melalui pembersihan keyakinan dan menumbuhkan keimanan kaum muslimin. Perjuangan Nabi belum sampai pada pembentukan instrumen sebuah negara, karena institusi politik yang menopang sistem sosial dan ekonomi belum dibentuk. Selain karena agenda dakwah di Mekah belum mengarah pada pembentukan institusi politik, kondisi bangsa Quraisy yang masih kuat dalam mempertahankan status quo juga tidak memungkinkan untuk berdirinya sistem ketatanegaraan yang bersendi pada ajaran Islam.

Dengan kondisi demikian, Nabi Muhammad harus mengalihkan pandangan dan harapan baru pada masyarakat lain yang lebih memungkinkan untuk kemajuan dan kesuksesan dakwah Islam. Namun, ketika beliau mengalihkan pandangan dan harapan ke masyarakat suku Tsaqif sebelah timur laut Mekah, yaitu Tha'if, hasilnya setali tiga uang dengan harapan yang diletakkan pada masyarakat Mekah, bahkan beliau mendapatkan perlakuan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Adanya penolakan, penganiayaan, dan pengusiran penduduk Mekah dan masyarakat Thaif, tampaknya dakwah Islam mengalami stagnasi

Fenomena ini mendorong Nabi untuk mengarahkan dakwah beliau kepada penduduk Yatsrib. Kebetulan saat itu kondisi Yatsrib sedang kacau balau akibat perang Bu'ats, perang besar yang nyaris menamatkan riwayat suku Aus dan Khazraj selaku aktor utama peperangan ini. Dakwah tersebut melahirkan perjanjian antara Nabi dengan kaum Muslim Yatsrib, yang kemudian dikenal dengan Bay'ah 'Aqabah dan terjadi dua kali. Bay'ah 'Aqabah inilah yang dipandang sebagai "pakta persekutuan" antara Nabi dan kaum muslim Yatsrib. Di dalam perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak untuk saling membantu, melindungi, dan membela keselamatan, serta kepentingan masing-masing (Syahrur, 2023).

Bay'ah 'Aqabah antara Nabi dengan kaum muslim Yatsrib tersebut memberikan harapan baru kepada Nabi dan para pengikutnya untuk lebih leluasa menyiarkan dakwah Islam. Dalam beberapa bulan setelah Bay'ah 'Aqabah kedua, Nabi memerintahkan kaum muslim Mekah untuk berhijrah ke Yatsrib. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi dan Abu Bakar bersama kaum muslimin tiba di Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 September 622. Peristiwa hijrah Nabi inilah yang kemudian dijadikan awal dalam perhitungan tahun Hijriyah.

Para ahli sejarah menyatakan bahwa dalam berhijrah Nabi mengendarai seekor unta “al-Quswa” yang dilepas tali kekangnya. Beberapa tokoh berpengaruh Yatsrib berusaha menghentikan langkah unta dengan memohon kepada Nabi untuk singgah di rumahnya sambil menawarkan jamuan yang telah disiapkan, namun beliau selalu menjawab, “Biarkan dia berjalan sekehendaknya, karena unta ini ada yang menyuruhnya.”¹⁰ Banyak rumah tokoh penting dilewati unta, termasuk kerabat Nabi, dan semua berharap agar beliau sudi singgah di rumah mereka. Namun, lagi-lagi Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, sampai akhirnya tiba di tempat dua anak yatim, Sahal dan Suhail, anak Amr bin Ammarah yang berada dalam pengasuhan Mu’adz bin Afra, dekat rumah Abu Ayyub al-Anshâri. Di tempat inilah kemudian dibangun Masjid Nabawi, setelah Nabi membeli tanah tersebut.

Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan langkah politik yang tepat, terutama dalam rangka mengefektifkan dakwah Islam, karena di kota itu beliau mendapatkan dukungan yang penuh dari warganya. Langkah-langkah politik Nabi tersebut berhasil dengan waktu singkat membentuk suatu komunitas Muslim yang kuat, bebas, dan mandiri, bukan komunitas yang lemah, teraniaya, dan tertindas seperti ketika masih berada di Mekah. Dari komunitas tersebut secara berangsur-angsur Nabi membentuk masyarakat yang teratur yang kelak merupakan cikal bakal berdirinya negara Islam.

Rasulullah sangat paham bagaimana mengatasi konflik yang sangat akut. Atas dasar itu, setelah membangun masjid sebagai sentra aktivitas, langkah selanjutnya adalah memperkokoh persatuan di kalangan Muhajirin dan Anshar dengan cara mempersaudarakan mereka, sampai dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun dari kaum Muhajirin yang tidak mempunyai saudara dari kaum Anshar. Beliau melakukan konsolidasi kehidupan masyarakat Madinah yang heterogen tersebut, dengan melakukan penataan dan pengendalian sosial masyarakat secara bijaksana untuk mengatur hubungan antara golongan dalam berbagai bidang kehidupan

Adapun terhadap golongan non-Muslim, khususnya kaum Yahudi, Nabi membuat perjanjian tertulis dengan mereka. Isi perjanjian itu terutama menitikberatkan persatuan kaum muslimin dan Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerja sama, persamaan hak dan kewajiban di antara semua golongan dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, serta mengikis segala bentuk perbedaan pendapat yang timbul dalam kehidupan bersama.

Perjanjian ini dibuat pada tahun pertama Hijriyah, sebelum terjadi Perang Badar dan dikenal dengan nama Piagam Madinah. Menurut Ashgar Ali Engineer, piagam tersebut sangat revolusioner dan sangat mendukung gagasan Nabi bagi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan damai. Sebelum adanya Piagam Madinah, masyarakat Arab tidak pernah hidup

sebagai satu komunitas antarsuku dengan suatu kesepakatan. Bahkan, yang menarik dari isi perjanjian itu, menurut Haikal, adalah pernyataan yang berisi jaminan kebebasan beragama bagi segenap penduduk Madinah, di samping kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Ia menilai poin-poin dalam Piagam Madinah sebagai suatu keputusan luhur, yang hanya dapat dilakukan oleh pemimpin bijaksana (Zainuddin: 2022, 90)

Sayid Ahmad Faraj mengategorikan Piagam Madinah sebagai undang-undang suatu negara yang baru muncul, yang di dalamnya mengatur kekuasaan politik, hak-hak manusia, dan pengelolaan urusan masyarakat. Ia merupakan peraturan asasi mengenai sistem politik dan sosial bagi komunitas Islam dan mengatur hubungan dengan komunitas lainnya. Perjanjian ini tidak hanya menghadirkan sebuah aturan masyarakat, namun juga merupakan dokumen yang mendasari terbentuknya sebuah negara

Menurut Munawir Sjadzali, fondasi yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah: Semua penduduk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas. Hubungan antara sesama anggota komunitas muslim, dan antara komunitas muslim dengan anggota komunitas lain didasarkan atas prinsip: 1) Bertetangga baik, 2) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, 3) Membela mereka yang teraniaya, 4) Saling menasihati, dan 5) Menghormati kebebasan beragama

Sampai di sini timbul pertanyaan, apakah organisasi masyarakat Madinah pada masa Nabi itu telah memenuhi kriteria sebagai sebuah negara? Secara leksikal, negara mengandung arti: (a) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; (b) kelompok sosial yang mempunyai wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Adapun dalam hukum internasional, negara sebagai kesatuan politik sekurang-kurangnya harus memiliki empat unsur, seperti dirumuskan dalam Konvensi Montevideo, yaitu: (a) penduduk yang tetap; (b) wilayah tertentu; (c) pemerintah; dan (d) kemampuan mengadakan hubungan dengan negaranegara lain. Al-Mawardi juga menyebutkan ada lima unsur pokok dalam suatu negara, yaitu: (a) agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat; (b) wilayah; (c) penduduk; (d) pemerintah yang berwibawa; dan (e) keadilan dan keamanan (Mawardi : 2010, 83).

Piagam Madinah memang merupakan suatu dokumen politik yang patut dikagumi sepanjang sejarah dan sekaligus membuktikan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang rasul, melainkan juga seorang negarawan. Piagam ini memberikan otonomi yang luas kepada suku-suku yang ada di Madinah dan mengizinkan warga non-muslim untuk menjalankan keyakinannya serta hidup berdampingan dengan kaum muslim. Tidak ada satu bukti sejarah pun yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah memaksa umat lain untuk menganut Islam. Persepsi sebagian orang Barat bahwa Muhammad, dengan pedang terhunus, memaksa orang untuk memeluk Islam, adalah persepsi yang sama sekali tidak ditemukan buktinya dalam fakta sejarah.

Setelah menjadikan Madinah sebagai pusat kota dan peradaban Islam, Rasulullah mengirim delegasi ke negara-negara tetangga, mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mengajak umat manusia untuk menganut agama Allah. Beliau juga melakukan pembebasan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Makkah, yang terjadi pada tahun 10 Hijriyah dengan membawa rombongan sebanyak 120.000 orang. Pada saat pembebasan kota Mekah, kaum muslimin berada pada puncak kemenangan dan Rasulullah berada pada puncak kekuasaan, dan di saat yang bersamaan beliau juga berada pada puncak ketawaduan dan kasih sayang.

2. Sejarah Politik di Masa Khulafah Rasyidin

Istilah Khulafah Rasyidin selalu dipakai untuk menunjuk pada masa dan sistem kepemimpinan yang lurus pasca kepemimpinan Rasulullah, yaitu: pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sistem khilafah rasyidah dianggap selesai setelah sistem pemerintahan berubah menjadi kerajaan sejak masa Muawiyah dan keturunannya hingga masa-masa berikutnya.

a. Khalifah Abu Bakar

Baiat yang dilaksanakan di Saqifah ini kemudian dikuatkan dengan baiat secara umum yang diadakan di Masjid Nabawi. Dalam baiat ini, Abu Bakar menyampaikan pidato sebagai berikut:

“Saudara-saudara, saya sudah terpilih untuk memimpin kamu sekalian, dan saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah kuat di mata saya, sesudah haknya saya berikan kepadanya, insya Allah, dan orang yang kuat buat saya adalah lemah sesudah haknya saya ambil. Apabila ada golongan yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan rasul-

Nya. Tetapi apabila saya melanggar perintah Allah dan rasul-Nya, maka gugurlah ketaatan kalian kepada saya. Laksanakanlah shalat kalian, Allah akan merahmati kalian” (Husen : 147).

Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun, 6 bulan, 4 hari. Selama menjalankan pemerintahan, hal-hal penting yang dilakukan adalah diteruskannya pengiriman Usamah menghadapi Romawi yang pernah dipersiapkan Rasulullah sebelum meninggal, perang melawan orang-orang murtad dan para pembangkang yang tidak mau membayar zakat, memerangi Musailamah al-Kadzdzab (yang mengaku nabi palsu), dan pengumpulan Al-Qur'an.

Di akhir masa pemerintahannya, Abu Bakar memanggil beberapa sahabat terkemuka dan meminta pendapat mereka tentang Umar. Pro-kontra memang sempat muncul, terutama karena sikap Umar yang terlalu keras. Meski demikian, Abu Bakar tetap pada keputusannya untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya. Dalam kondisi sakit, beliau memanggil Usman bin Affan untuk menuliskan wasiatnya. Inilah wasiat Abu Bakar yang ditulis oleh Usman:

“Inilah pesan Abu Bakar bin Abi Quhafah pada akhir hayatnya dengan keluarnya dari dunia ini, dan pada awal memasuki akhirat dengan tinggal di sana. Di tempat ini orang kafir akan percaya orang durjana akanyakin, dan orang yang mendustakan akan membenarkan. Saya menunjuk pengganti yang akan memimpin kalian adalah Umar bin Khattab, patuhi dan taatilah dia. Saya tidak akan mengabaikan segala yang baik sebagai kewajiban saya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama, kepada diri saya, dan kepada kalian. Kalau dia berlaku adil, itulah harapan saya, dan itu pula yang saya ketahui tentang dia. Tetapi kalau dia berubah, maka setiap orang akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri. Yang saya kehendaki adalah yang terbaik, dan saya tidak mengetahui segala yang gaib. Orang yang zalim akan mengetahui perubahan apa yang mereka alami” (Jalaluddin : 2019 : 78).

b. Khalifah Umar bin Khattab

Melalui surat wasiat dari Abu Bakar yang ditulis oleh Usman ini, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Pengangkatan Umar ini diterima dengan baik oleh semua umat Islam ketika itu, meskipun awalnya terjadi pro-kontra. Menurut Syibli Nukmani, Umar telah meletakkan dasar-dasar demokrasi, walaupun masih khas namun syarat-syarat yang esensial bagi suatu bentuk pemerintahan yang demokratis telah dilahirkan. Yang paling fundamental adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan. Majelis ini dibentuk sebagai tempat konsultasi dan untuk memecahkan masalah-masalah penting yang dihadapi umat.

Umar memiliki kearifan dan kebijakan yang mendalam serta kenegarawanan yang tidak ada bandingannya dalam hal memerintah, penunjukan pejabat dan pegawai-pegawai negara, khususnya dalam menilai kapabilitas seseorang. Orang-orang yang ditunjuk untuk menduduki berbagai pos biasanya adalah orang-orang yang terbaik yang ada untuk jabatan itu. Namun, tidak semua pejabat pemerintahan ditunjuk langsung oleh beliau, melainkan ada yang diangkat melalui pemilihan secara terbuka dalam majelis permusyawaratan, terutama untuk jabatan yang strategis.

Umar menjabat khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Pada masa pemerintahannya, Umar banyak menerapkan kebijakan-kebijakan baru, di antaranya pendirian Baitul Mal, sekolah dan pengadilan, penentuan tanggal Hijriyah, penentuan pajak dan gaji pegawai, sensus dan pembagian provinsi, pengenaan bea cukai, organisasi jawatan kepolisian, penelitian dan penaksiran tanah, penerimaan gelar Amirul Mukminin, pemberian gaji bagi guru sekolah dan kebijakan lainnya.

Di akhir kepemimpinannya, Umar membentuk dewan formatur yang anggotanya terdiri atas Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqas. Di samping keenam orang ini, Umar juga menunjuk Abdullah bin Umar selaku penasihat dan tidak ditempatkan sebagai calon pengganti khalifah. Beliau juga menunjuk Abu Thalhah al-Anshari dari suku Khazraj sebagai pelaksana perintahnya. Ia disuruh mengambil 50 orang anggota sukunya dengan pedang di tangan untuk menjaga di pintu Majelis Pertemuan.

Ketentuan tentang pemilihan khalifah pengganti ditetapkan oleh Umar sebagai berikut: (1) khalifah yang akan dipilih haruslah anggota dari dewan formatur tersebut; (2) apabila dua orang mendapatkan dukungan yang sama besar, maka calon yang didukung oleh Abdurrahman bin Auf yang dianggap menang; (3) apabila ada anggota dewan formatur yang tidak mau mengambil bagian dalam pemilihan, maka anggota tersebut harus segera dibunuh; (4) apabila salah seorang telah terpilih, dan kelompok minoritas tidak mengakuinya, maka mereka yang tidak mengakui harus dibunuh; (5) apabila dua calon didukung oleh jumlah anggota yang sama, anggota yang menolak pilihan Abdurrahman bin Auf harus dibunuh; dan (6) apabila dalam waktu tiga hari tidak berhasil memilih khalifah, maka keenam anggota harus dibunuh dan menyerahkan keputusannya kepada rakyat

Abdurrahman bin Auf sebagai kunci kesuksesan pemilihan mendatangi Ali bin Abi Thalib dan bertanya apakah Ali mau berjanji untuk bertindak sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan mengikuti keputusan-keputusan dari khalifah terdahulu? Ali menjawab, "Mengenai Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, saya akan mengikutinya dengan penuh

keimanan dan kerendahan hati. Namun, mengenai keputusan dari khalifah terdahulu, apabila sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, maka siapa yang dapat menolaknya? Tetapi bila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, siapa yang akan menerima dan mengikutinya? Saya akan bertindak sesuai dengan pengetahuan dan kebijaksanaan saya.”

Kemudian Abdurrahman bin Auf mendatangi Usman dan menanyakan hal yang sama kepadanya sebagaimana yang ditanyakan kepada Ali. Usman setuju dengan apa yang ditawarkan Abdurrahman untuk bertindak sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan mengikuti keputusankeputusan dari khalifah terdahulu. Akhirnya, Abdurrahman bin Auf memilih Usman bin Affan dan mayoritas formatur pun memilih Usman.

Selain terkenal sebagai seorang yang dermawan, Usman juga seorang yang sangat tekun beribadah. Kehidupannya sehari-hari dilalui dengan berpuasa sepanjang zaman. Dialah orang yang memberikan makan orang lain dengan daging, samin, dan madu, sedangkan dirinya sendiri cukup makan dengan roti kering yang dioles dengan minyak makan. Rasulullah melukiskan Usman sebagai orang yang cahayanya menyinari penghuni langit seperti sinar matahari yang menyinari penghuni bumi. Rasulullah juga pernah bersabda “Setiap Nabi mempunyai teman, dan temanku dalam surga adalah Usman.”

c. Khalifah Usman bin Affan

Sebagai seorang khalifah, Usman bin Affan melaksanakan dan meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, sesuai dengan janji yang diminta Abdurrahman bin Auf ketika akan dibaiat, dan berjalan cukup efektif khususnya pada masa enam tahun pertama pemerintahannya. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, Usman mulai dikelilingi dan dikendalikan kaum kerabatnya terutama kalangan Bani Umayyah, para kaum Thulaqa yang masuk Islam dalam kondisi tidak berdaya berhadapan dengan pasukan Rasulullah yang berada dalam puncak kejayaannya pada waktu Fath}u Mekah. Sebagian besar para petinggi yang memangku jabatan pada masa pemerintahan Usman adalah mereka yang meskipun sudah menganut Islam, namun belum sepenuhnya terbebas dari ‘ashabiyah kesukuan nepotismenya.

Dalam menjalankan kebijakan, Abu Bakar dan Umar selama pemerintahannya tidak pernah memberikan jabatan kepada keluarga dan kerabat-kerabatnya. Mereka berdua meniru Rasulullah yang tidak pernah menunjuk salah seorang dari Bani Hasyim untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Namun, Usman dalam pertengahan pemerintahannya mulai menyimpang dari kebijaksanaan ini. Sedikit demi sedikit ia mulai menunjuk sanak kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan memberikan kepada mereka keistimewaan dan fasilitas yang menyebabkan munculnya protes dan kritikan rakyat secara umum

Usman sangat baik hati kepada kerabatnya dengan memberikan jabatan, uang, fasilitas, dan gaji besar yang diambil dari Baitul Mal. Sekadar menyebutkan sebagai contoh, Usman memberikan lima ratus ribu dinar kepada Marwan yang berasal dari khumus (seperlima) Afrika dan juga menetapkan khumus Mesir untuk Marwan. Hakam, ayah Marwan, Abu Sufyan bin Harb, dan Marwan sendiri diberi masing-masing seratus ribu dirham dari Baitul Mal. Usman juga memberi Abdullah bin Khalid bin Usaid seratus ribu dirham dari Baitul Mal tanpa alasan yang benar. Marwan juga diberi tanah Fadak, yang sebenarnya milik Fatimah sebagai warisan dari Rasulullah. Salah satu pasar umum di Madinah, yang sudah diwakafkan Rasulullah kepada kaum muslimin, diberikan kepada Harts bin Hakam al-Umawi. Padang rumput di Madinah yang oleh Nabi dinyatakan sebagai lahan umum untuk menggembalakan hewan milik seluruh kaum muslim, oleh Usman dikhususkan untuk Bani Umayyah dan sejak saat itu, hanya unta milik Bani Umayyah yang digembalakan di lahan tersebut.

Kebijakan Usman ini menimbulkan protes di kalangan para sahabat, bukan semata-mata karena penumpukan kekuasaan pada keluarga Bani Umayyah, melainkan karena perilaku pejabatnya yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Krisis politik yang menggoncangkan pemerintahan khalifah Usman di Madinah dimulai ketika Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh menzalimi orang-orang Mesir. Mereka mengadakan tingkah laku Abdullah bin Sa'ad kepada Usman, sehingga Usman menulis surat peringatan kepada Abdullah bin Sa'ad. Namun, Abdullah bin Sa'ad tidak mau menerima peringatan Usman, bahkan memukul orang-orang Mesir yang diutus Usman dan membunuhnya. Setelah itu, tujuh ratus orang Mesir datang ke Madinah mengadakan perlakuan Abdullah bin Sa'ad kepada Usman, dan Usman pun merespons mereka dengan berkata, "Pilihlah orang yang kalian sukai, dan saya akan jadikan dia sebagai pemimpin kalian.

d. Khalifah Ali bin Abi Thalib

Khalifah Ali bin Abi Thalib Sepeninggal Usman, tiada pilihan lain untuk dijadikan khalifah penerus Usman kecuali Ali bin Abi Thalib. Ali diba'at oleh anggota dewan formatur bentukan Umar yang masih ada secara aklamasi, kemudian diikuti secara umum oleh umat Islam di Masjid Nabawi. Meskipun pada awalnya Ali keberatan, namun demi kemaslahatan umat, Ali menerimanya sebagai suatu amanat yang harus dipikul.

Setelah memegang tampuk kekhalifahan, naluri dan visi kepemimpinan Qur'ani Ali mulai dilaksanakan. Ali menyingkirkan para pejabat korup dan penindas rakyat serta menyelidiki kekayaan Baitul Mal yang telah diambil secara haram. Ia berupaya menegakkan kembali kebijakan yang sudah digariskan oleh Rasulullah dan sudah diupayakan oleh Abu Bakar dan Umar, namun sudah terkontaminasi pada separuh terakhir pemerintahan Usman. Ali

sangat tegas dalam memerangi nepotisme dan penyimpangan lain, sehingga ketika Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam menginginkan jabatan, karena membaiainya, Ali tidak memberikan jabatan kepada mereka berdua.

Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah selama 4 tahun, 9 bulan, 8 hari. Dalam rentang waktu pemerintahannya itu, Ali menjalankan kekhalifahan dengan banyak pertentangan dan melakukan peperangan. Meskipun demikian, Ali berusaha menjalankan pemerintahan sesuai dengan Sunnah Rasulullah, melanjutkan kebijakan yang baik dari para khalifah sebelumnya, mereformasi pemerintahan, meletakkan dasardasar gramatika bahasa Arab, memberikan khotbah-khotbah tentang ilmu agama, retorika, falsafah, dan tentang kewajiban manusia kepada Tuhan. Ali juga telah memperkenalkan dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, mengatur keamanan negara, membentuk lembaga-lembaga seperti lembaga keuangan umum, pengadilan, tentara, dan lain-lain

3. Sejarah Politik di Masa Ummayah

Setelah terbunuhnya khalifah Ali bin Abi Thalib, maka kedudukannya digantikan dan dijabat oleh anaknya Hasan. Ia memegang kekhalifahan setelah kematian ayahnya, Ali bin Abi Thalib dengan pembaiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kufah (suatu kota yang ada di Irak, bagian Barat dari sungai Eufрат) dan tinggal di sana selama kurang lebih enam bulan. Pada suatu hari datanglah Mu'awiyah bin Abi Sufyan kepada Hasan dengan melakukan perundingan. Dia berupaya agar Hasan menyerahkan kekuasaan khalifah kepadanya dengan syarat tidak seorang pun menuntut kepadanya dari kalangan orang-orang Madinah, Hijaz, dan Irak

Permasalahan yang terjadi pada masa ayahnya, Ali bin Abi Thalib dengan menunaikan ataupun melepaskan segala hutang-hutangnya dan itu disanggupi oleh Mu'awiyah seperti yang diinginkan oleh Hasan dan karenanya ia pun membuat perjanjian damai. Maka tercapailah perdamaian di antara kedua belah pihak. Perjanjian inilah yang kemudian akhirnya dapat mempersatukan Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik, kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu juga menyebabkan Mu'awiyah menjadi penguasa yang absolut dalam sejarah pemerintahan Islam. Di mana tahun 41 H/661 M atau tahun persatuan dikenal dalam sejarah sebagai tahun bersatunya umat Islam ('am jama'ah). Selain itu, 'am jama'ah juga menandai akhir dari era Khulafa' al-Rasyidin dan awal era pemerintahan kerajaan; dimulainya kekuasaan Dinasti Bani Umayyah dalam belantika sejarah politik Islam. Seorang pemikir Islam, as-Suyuthi mengemukakan bahwa peristiwa itu merupakan wujud dari mu'jizat nabawiyah dalam sebuah Hadis, "Allah Swt. akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari kalangan muslim." Hasan Ali bin Abi Thalib R.a. turun sebagai khalifah pada 41

H pada bulan Rabi'ul Awal sebagian pendapat menyebut Jumadil Awal untuk menghindari pertikaian yang terjadi dalam pemerintahan Islam. Hasan kemudian meninggalkan kota Kufah menuju Madinah dan tinggal di kota tersebut sampai ia meninggal karena diracuni oleh istrinya sendiri Ja'dah binti Asy'ast bin Qaish yang belakangan kemudian diperistri oleh Yazid bin Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan wafat pada tahun 49 H atau 5 Rabi'ul Awal 50 H.

Sebagai khalifah atau raja pertama Dinasti Bani Umayyah, Mu'awiyah bin Abi Sufyan (661-680 M) membentuk pemerintahannya sebagaimana sistem kerajaan; kekuasaan diwariskan secara turun-temurun, dan khalifah-khalifah setelahnya kerap kali bertindak otoriter. Meski anak dari pasangan Sufyan bin Harb dan Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, Mu'awiyah bin Abi Sufyan adalah salah seorang sahabat Rasulullah Saw. Ayahnya adalah salah seorang dari pembesar atau tokoh Quraisy di zaman jahiliyah, pemimpin yang dihormati dan disegani, serta memiliki harta yang banyak. Mu'awiyah adalah satu di antara beberapa orang sahabat yang menjadi penulis wahyu. Bahkan, ia pernah meminta kepada Rasulullah Saw. supaya memperisteri anak perempuannya, yaitu Azzah binti Abi Sufyan, akan tetapi tidak terjadi. Ketika daerah Syam bisa ditaklukkan, khalifah Umar menjadikan Mu'awiyah sebagai walinya (gubernur) untuk kota Damaskus setelah saudaranya Yazid bin Abi Sufyan, dan tetap diteruskan pada masa Khalifah Usman bin Affan, bahkan daerah kekuasaannya ditambah. Akhirnya, Mu'awiyah berhasil membangun pusat pemerintahan di kota Damaskus dan berkuasa selama 40 tahun.

Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Oleh Mu'awiyah bin Abi Sofyan ibu kota negara yang sebelumnya di Madinah dipindahkan ke Damaskus. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulah Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab.¹⁴ Ekspansi yang berhasil dilakukan pada masa Mu'awiyah antara lain ke wilayah-wilayah: Tunisia, Khurasan sampai ke Sungai Oxus, Afganistan sampai ke Kabul, kemudian dilanjutkan ke Byzantium, bahkan sampai ke India dan dapat menguasai daerah Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Malta.

Konsolidasi internal dilakukan sejak masa pemerintahan Mu'awiyah dengan tujuan untuk memperkuat barisan dalam rangka pertahanan dan keamanan dalam negeri, antisipasi atas setiap gerakan pemberontakan, dan untuk memperlancar program pemerintah. Idealnya konsolidasi tersebut dijadikan sebagai prasarana menuju keberhasilan program-program dinasti. Ada lima Diwan al-Jund (Dinas Urusan Kemiliteran), Diwan ar-Rasail (Dinas Urusan

Administrasi dan Surat atau The Board of Correspondence), Diwan al-Barid (Dinas Urusan Pos atau The Board of Posts), Diwan al-Kharaj (Dinas Urusan Keuangan atau the Board of Finance), dan Diwan al-Khatam (Dinas Urusan Dokumentasi atau the Board of Signet)

Instrumen tertinggi dalam pemerintahan yang bercorak Arab adalah Syura, sebuah diwan (kansil), syaikh yang ditunjuk oleh khalifah atau oleh gubernur provinsi, dengan fungsi konsultatif dan eksekutif. Mu'awiyah sendiri jarang memberi perintah, tetapi dalam melaksanakan pemerintahannya cukup melalui proses yang dapat diandalkan berdasarkan kepercayaan dan melalui proses yang dapat diandalkan berdasarkan kepercayaan dan melalui kemampuan, serta pengaruh pribadinya. Jasa-jasa dalam pembangunan di berbagai bidang banyak dilakukan pada masa pemerintahannya. Mu'awiyah mendirikan dinas pos, menertibkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang, dan jabatan qadhi (hakim), mulai berkembang menjadi profesi sendiri. Selain itu, jenis atau pola pemerintahan terdahulu mulai berubah sejak zaman Mu'awiyah. Walaupun berbentuk kerajaan, Mu'awiyah tetap membuktikan eksistensinya dengan terus membuat kemajuan-kemajuan

4. Sejarah Politik di Masa Abbasiyah

Bani Abbas adalah keturunan dari al-Abbas paman Rasulullah Saw. Pada dasarnya selama abad pertama hijriyah, keturunan al-Abbas sama sekali tidak pernah berniat untuk memegang kekhalifahan, mereka hanya memusatkan dukungan kepada keturunan Ali ibn Abi Thalib serta memperjuangkan hak mereka atas khilafah.¹⁸ Al-Abbas sangat meyakini hak Ali atas khilafah yang kemudian diikuti oleh anaknya Abdullah. Ketika ia dikaruniai anak laki-laki ia memberinya nama Ali sebagai bukti penghargaannya kepada Ali. Ali ini kemudian memperjuangkan keyakinan.

keluarganya mengenai hak Ali dan keturunannya atas khilafah. Untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan keturunan Ali dan keturunan al-Abbas, Khalifah Umayyah' Abd al-Malik ibn Marwan memanggil Ali ibn Abdullah beserta keluarga dan beberapa keturunan Ali ibn Abi Thalib dengan menyediakan sebuah kawasan bermukim di Hamimah (sebelah Timur Yordania). Hal ini dalam rangka kepentingan kontrol dan pengawasan terhadap mereka.

Kegiatan propaganda secara terang-terangan pada masa khalifah terakhir Umayyah, Marwan Ibn Muhammad, dipusatkan di Khurasan dan dengan cepat dapat menguasai ibu kota Maruw. Hal tersebut membuat wali Umawiy di sana meminta bantuan ke pusat. Pusat tidak tahu sama sekali kepada siapa tuntutan khilafah tersebut ditujukan hingga tibanya kitab rencana dan kegiatan propaganda Ibrahim al-Abbasiy kepada Marwan ibn Muhammad. Segera khalifah memerintahkan penangkapan atas Ibrahim, namun sebelumnya Ibrahim mewasiatkan saudaranya Abu al-Abbas untuk menjadi al-Imam dan menginstruksikannya ke Kufah.

Sebelum didahului oleh Abu Salamah al-Khilal yang berniat untuk mengambil alih posisi al-imam, Abu al-Abbas dengan dibantu Abu Muslim menghambat usaha Abu Salamah tersebut, Abu Muslim yang telah resmi sebagai panglima pemberontak mengirim orangnya ke Kufah untuk segera membaiai Abu al-Abbas. Dengan terpaksa Abu Salamah turut membaiai. Setelah dibaiai Abu al-Abbas segera memusatkan usahanya untuk menghancurkan Marwan Ibn Muhammad Khalifah Umayyah terakhir, terjadilah Perang al-Zab,²⁰ yang dalam sejarah disebut sebagai salah satu perang yang sangat hebat. Tentara Bani Abbas dipimpin oleh paman Abu al-Abbas, Abdullah ibn Ali, sedangkan tentara Umayyah dipimpin langsung oleh Khalifah Marwan ibn Muhammad

Tentara Umayyah mengalami kekalahan dan mundur ke Damaskus. Tentara Abbasiyah terus mengejar dan memasuki Damaskus, satu per satu daerah Syiria dapat ditaklukkan. Marwan ibn Muhammad akhirnya tertangkap di Mesir dan terbunuh pada bulan Zulhijjah 132 H/ 750 M. Secara resmi kekhalifahan Umayyah runtuh dan digantikan oleh Abbasiyah, kekhalifahan baru dengan khalifah pertama Abu al-Abbas, 'Abdullah Ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas yang terkenal dengan gelar al-Shaffah (Sang Pembantai). Damaskus tetap menjadi ibu kota kekhalifahan, dan baru pada masa Abu Ja'far al-Mansur khalifah kedua, ibu kota dipindahkan ke Baghdad.

5. Sejarah Politik di Masa Turki Utsmani

Bangsa Turki mempunyai peran yang sangat strategis dalam perkembangan kebudayaan Islam. Peran strategis tersebut terlihat dalam bidang politik ketika mereka masuk dalam tentara profesional maupun dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk khalifah-khalifah Bani Abbas. Kemudian mereka sendiri membangaun kekuasaan yang sekalipun independen namun tetap mengaku loyal kepada khalifa Abbas. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya Bani Saljuk (1038-1194). Setelah hancurnya Bagdad ditangan bangsa Mongol, orang-orang Turki semakin mempertegas kemandirian mereka dalam membangun kekuasaannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Turki Usmani (1281-1924). Bahkan pengaruh dinasti itu menjangkau wilayah yang sangat luas, termasuk Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Tengah, Timur Tengah, Mesir dan Afrika Utara (Ahmad, 2019 : 201).

Selama lima abad pemerintahan Turki Usmani, telah memainkan peranan yang pertama dan satu-satunya dalam menjaga dan melindungi kaum muslimin. Turki Usmani merupakan pusat Khilafah Islam, karena merupakan pemerintahan Islam yang terkuat pada masa itu, bahkan merupakan Negara paling besar di dunia. Akbar S. Ahmad menjelaskan bahwa peran Turki Usmani tidak dapat dianggap remeh. Mereka adalah kekhalifaan muslim terpenting, fakta bahwa mereka memerintah salah satu kekhalifaan terbesar dalam waktu terlama dalam sejarah,

mereka menjadi penjaga tempat-tempat suci di Arabia, khlaifah, penerus Nabi adalah penguasa Usmani dan mereka merupakan kalangan muslim Sunni yang menjadi wakil aliran utama Islam dan penguasa kekhalifan Muslim terbesar (Syafiq, 2022 : 115).

Puncak kemajuan Turki Usmani berada pada zaman pemerintahan kekuasaan Sultan Mahmud II, antara lain pada tahun 1453. Pada saat ini Turki Usmani dapat menaklukkan Byzantium Romawi. Dari Istanbul mereka menguasai daerah sekitar laut tengah dan berabad-abad lamanya Turki sebagai suatu Negara yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan oleh ahli-ahli politik dari Eropa. Dalam termin Islam secara keseluruhan, puncak-puncak baru pencapaian dalam puisi, seni dan arsitektur diukur selama periode ini. Dimasa itu pula Usmani melakukan ekspansi besar-besaran (Salim Akbar, 2022 : 334).

Namun akhirnya kekuasaan politik dan militer yang hampir tak terkalahkan ini mulai mendapat tantangan pada masa Sultan Murad IV (1623-1640) dengan munculnya kekuatan Barat. Kekalahan militernya di Eropa dan India, menurut Abdullahi Ahmed an-Na'im merupakan konsekwensi yang harus diterima dinasti ini akibat kemerosotan agama dan budaya, penyimpangan dari tradisi dan korupsi. Banyak pengamat pada masa itu berpendapat bahwa solusi terhadap melemahnya tentara dan rezim Emperium Usmani sesungguhnya bisa ditemukan dengan kembali kepada tata atuan lama (nizām al-qadīm), adat dan tradis Islam serta budaya Turki yang tinggi.

Menjelang awal abad ke-XVIII, seruan untuk kembali ke zaman keemasan Turki Usmani justru berganti dengan seruan menyongsong tatanan baru. Yaitu keinginan Kesultanan Usmani untuk pertama kalinya mulai mencermati perkembangan budaya dan peradaban Barat dengan mengirimkan beberapa Duta Besarnya ke sejumlah ibu kota penting di Eropa guna melaporkan kemajuan yang terjadi di sana. Ketika keadaan pemerintahannya lemah Negara-negara Nasrani segera berkumpul, sebelumnya belum pernah berkumpul seperti itu, tujuannya untuk mengganyang *the sick man* "orang yang tengah sakit" (pemerintahan Usmani). Lalu mereka merebut sedikit demi sedikit kekuasaanya, akhirnya pemerintahan Usmani jatuh tercampakkan.maka berakhirilah kekhilafan Islam terakhir yang menyebabkan tercerai berainya kaum muslimin. Kekuasaan Usmani terpecah ke dalam berbagai kelompok, golongan,dan Negara-negara kecil. Bermula dari sinilah munculnya bibit-bibit baru dalam kesultanan Turki Usmani yang kelak ingin melepaskan diri dari kungkungan kekhalifan dan menggantikan bentuk pemerintahan dengan pemerintahan republik Turki yang bercorak sekuler.

6. Sejarah Politik di Indonesia

a. Gerakan Politik Islam pada Era Pra dan Awal Kemerdekaan

Persoalan yang menarik bahkan unik pada masa ini adalah wacana dan perdebatan tentang konsep kebangsaan yang juga membawa gagasan Islam sebagai dasar negara dan gagasan lain yang menghendaki berlakunya negara dan hukum lain yang juga berakar dalam kehidupan rakyat Indonesia. Karena itu berdasarkan catatan sejarah bangkitnya nasionalisme Indonesia pada masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan di negeri ini berjuang melawan kolonial Belanda untuk segera bebas dari cengkeraman penjajah ini. Dalam perjuangan ini Islam mempunyai peran penting dalam menentukan eksistensi negeri ini ke depan, dan secara historis dapat diikuti perdebatan tentang apakah negara merdeka kelak berideologi Islam atau non Islam.

Pertama, pada tahun 1916, muncul heboh Jawi Hisworo, yaitu pertarungan politik antara perjuangan ideologi non Islam melawan Islam. Ketika itu sebuah koran berbahasa Jawa Jawi Hisworo memuat tulisan yang menghina Nabi Muhammad dengan mengatakannya sebagai pemabuk dan pematik yang tentu saja kemudian membangkitkan umat Islam untuk membela haknya disertai muatan gagasan bahwa masyarakat perlu diatur secara Islam, seperti yang disyariatkan melalui Nabi Muhammad Saw. Gerakan ini secara gencar disuarakan antara lain oleh Sarekat Islam. Menghadapi reaksi umat Islam seperti ini pada tahun 1918 pendukung Jawi Hisworo membentuk Panitia Kebangsaan Jawa. Panitia ini mengecam gerakan kelompok Sarekat Islam dalam kehidupan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kelompok ini menandakan bahwa politik dan agama harus dipisah, sedang kelompok Sarekat Islam justru ingin mengaitkan politik dengan agama (Affan, 2019 : 29)

Kedua, Soekarno dan Natsir pada era ini telah melakukan polemik tentang Islam dan Negara. Polemik ini diawali dari tulisan Soekarno dalam Panji Islam dengan judul Memudahkan Pengertian Islam. Tulisan ini semula dimaksudkan untuk menanggapi tulisan K.H. Mas Mansur yang berjudul Memperhatikan Gerakan Pemuda di dalam Majalah Adil dan Panji Islam.

Ketiga, pengalaman berikutnya adalah perdebatan secara formal ada di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang dibentuk pada bulan April 1945 maupun dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), suatu badan yang dibentuk untuk menyatakan kemerdekaan, melakukan pengalihan kekuasaan, mensahkan konstitusi, dan membentuk pemerintahan bagi Indonesia jika akan merdeka (Haikal, 2022 : 298).

b. Gerakan Politik Islam pada Era Orde Lama

Adu kekuatan politik ini bukan hanya di Konstituante bahkan juga di masyarakat begitu gencar sehingga tidak pernah mencapai kesepakatan tentang dasar negara di antara elite, yaitu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam dan kedua kelompok ini tidak pernah memperoleh dukungan minimal untuk sebuah keputusan. Dalam polarisasi politik yang seperti inilah Soekarno menemukan alasannya untuk mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisi tiga hal: membubarkan Konstituante, mencabut berlakunya UUDS 1950 dan memberlakukan UUD 1945, dan rencana pembentukan MPRS dan DPAS.

Di bawah pemerintah Soekarno (1959-1966), era rezim yang diawali dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Muhaiman yang dikutip Mahfud MD, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah menjadi gong penutup bagi kehidupan demokrasi parlementer. Sejak dikeluarkan dekrit itu, dimulailah langgam otoritarian dalam kehidupan politik di Indonesia di bawah bendera Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin mengolah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan berdasarkan semangat gotong-royong. Implikasi sistem ini dijabarkan dalam amanat presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik (Manipol) yang rinciannya secara sistematis dikenal dengan akronim USDEK. Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang hipokrit yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan konstitusional yang disengaja, demi revolusi yang tak kunjung selesai. Namun perlu diingat bahwa demokrasi yang dalam sejarah bangsa kita ini telah menggoreskan suatu episode yang sangat berharga dalam rangka belajar mencari suatu sistem politik demokrasi yang sehat (Abdul Aziz, 2023 : 298).

c. Gerakan Politik Islam pada Era Orde Baru

Dalam perkembangannya rezim Demokrasi Terpimpin (1959-1966) yang kemudian disebut Orde Lama ternyata tak mampu bertahan dari goncangan yang disebabkan oleh maraknya konflik politik di tingkat elit (Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI) yang saling bersaing, Soekarno bertindak sebagai penyeimbang antara dua kekuatan lainnya. Ditambah dengan krisis ekonomi yang menimpa seluruh bangsa dan nyaris ambruk. Puncak elit tersebut adalah peristiwa G-30-S/PKI yang menumbangkan rezim Demokrasi Terpimpin serta meretas bagi peralihan kekuasaan dan pemerintahan Orde lama ke Orde Baru ditandai dengan turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan pasca kudeta G-30 -S/PKI pada tahun 1965.

Lahirnya Orde Baru didukung oleh kalangan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Kesatuan Aksi yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1965 mengetengahkan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) dan Tuntutan Hatnurani Rakyat (TUNHANURA). Melalui

kegiatan politik yang banyak mempergunakan kegiatan fisik berupa demonstrasi, dan ini mereka lakukan karena terdapat situasi anomie di dalam masyarakat, bersama ormas-ormas *onderbouw* partai-partai politik yang lemah pada zaman Demokrasi Terpimpin yang semuanya didukung oleh Angkatan Darat. Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk (Deliar Noor, 2019 : 67)

Pertama mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pemimpin/Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaiknya.

Ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Kebijakan-kebijakan politik pemerintah Orde Baru terhadap gerakan umat Islam atau hubungan Islam dan negara dapat dipolakan menjadi beberapa pola hubungan. Menurut Bahtiar Effendi hubungan Islam dan negara dapat dilihat dari lima teori. Pertama, teori dekonfensionalisasi, yaitu teori yang memiliki pandangan bahwa semua kelompok Islam menerima Pancasila. Kedua domestikasi Islam dari Harry J. Benda. Dalam pandangannya politik Islam dicengkeram oleh budaya dan orang Jawa. Ini berdasarkan catatan sejarah sejak abad 18 sampai saat ini. Ketiga, skismatik dan aliran berdasarkan penelitian Robert R Jay dan Clifford Geertz. Menurutnya Islam dan Jawa mengalami persaingan dalam bidang politik budaya dan sosial. Keempat, trikotomi dari Allan Samson yaitu pembagian politik Islam kepada fundamentalis, reformis dan akomodasionis. Menurutnya Islam juga mampu bekerja sama dalam bidang sosial ekonomi sebagai prioritas kegiatan mereka. Kelima, Islam kultural dari Donald K. Emmerson. Dalam kacamata Islam telah masuk dalam struktural, legislatif dan juga kultural atau yang lebih dikenal sebagai infrastruktural. Menurut Abdul Azis Thaba hubungan Islam dan negara ada tiga pola hubungan, yaitu hubungan antagonistik, resiprokal kritis, dan akomodatif.

4. KESIMPULAN

Komunikasi politik merupakan elemen yang tak terpisahkan dari sistem politik manapun. Ia berfungsi sebagai penghubung antara berbagai aktor politik, antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi opini, dan mencapai tujuan-tujuan politik. Studi tentang komunikasi politik mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi dan konsep dasar hingga peranannya dalam praktik politik. Sejarah politik Islam, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh yang kaya tentang bagaimana komunikasi politik digunakan untuk membangun komunitas, menyebarkan ajaran, dan membentuk negara. Piagam Madinah adalah bukti nyata bagaimana komunikasi politik yang efektif dapat menciptakan kerangka kerja bagi masyarakat yang majemuk dan harmonis. Pemahaman yang mendalam tentang komunikasi politik dan sejarahnya dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pemikir, praktisi, dan pengamat politik. Dengan memahami bagaimana komunikasi politik bekerja, kita dapat lebih baik dalam menganalisis, berpartisipasi, dan mengevaluasi proses politik di sekitar kita.

REFERENSI

- Ahmad, S. A. (2017). *From Samarkand to Stornoway: Living Islam* (Pangestuningsih, Trans.). Bandung: Mizan.
- Azhar, A. A. (2021). *Komunikasi Islam: Kajian konsep dan aplikasi komunikasi politik Islam*. Merdeka Kreasi.
- Coulson, N. J. (2007). *Hukum Islam dalam perspektif sejarah* (H. Ahmad, Trans.). Jakarta: P3M.
- Dewan Redaksi. (2000). *Ensiklopedi Islam* (Vol. 4). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Engineer, A. A. (2009). *Asal usul dan perkembangan Islam* (I. Baehaqi, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hassan, I. H. (2004). *Tarikh al-Islam as-siyasi wa ad-diny wa ats-tsaqafi wa al-ijtima'y* (3rd ed.). Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyah.
- Hikam, M. A. S. (2019). Politik hukum di Indonesia dalam konteks reformasi dan demokrasi. Dalam K. Zada & I. Muzayyad (Ed.), *Wacana politik hukum dan demokrasi Indonesia* (hlm. ...). Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. (Catatan: Harap tambahkan nomor halaman jika tersedia.)
- Hitti, P. K. (2005). *History of the Arabs* (R. C. L. Yasin & D. S. Riyadi, Trans.). Jakarta: Serambi.
- Lapidus, I. M. (1999). *Sejarah sosial ummat Islam* (G. A. Ma'adi, Trans.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Lapidus, I. M. (2001). *A history of Islamic societies* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Nur, M. (2021). *Pergulatan konsep negara dalam peradaban Islam modern*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Saifuddin. (2022). *Khilafah vis a vis nation state: Telaah atas pemikiran politik HTI*. Yogyakarta: Mahameru.
- Salim, A., & Azra, A. (2013). Introduction: The state and shari'a in the perspective of Indonesian legal politics. Dalam A. Salim & A. Azra (Ed.), *Shari'a and politics in modern Indonesia* (hlm. ...). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. (Catatan: Tambahkan nomor halaman jika tersedia.)
- Sunanto, M. (2003). *Sejarah kebudayaan Islam* (Edisi pertama, Cet. pertama). Jakarta: Prenada Media.
- Syahrur, M. (2023). *Tirani Islam: Genealogi masyarakat dan negara* (S. Z. Qudsy & S. Fata, Trans.). Yogyakarta: LKiS.
- Yatim, B. (2021). *Sejarah peradaban Islam* (Edisi ke-6). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, M., & Mustaqim, A. (2022). *Studi kepemimpinan Islam: Konsep, teori dan praktiknya dalam sejarah*. Yogyakarta: SUKA Press.